

**PENGARUH PAD, DAU, DAK, SiLPA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA
JAWA TENGAH TAHUN 2010-2015**



Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strara I pada
Program Studi Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Disusun Oleh :

ISMAWULAN KUSUMAWARDANI

B200130350

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PAD, DAU, DAK, SiLPA DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI TERHADAP BELANJA MODAL DI
KABUPATEN/KOTA JAWA TENGAH TAHUN 2010-2015**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

ISMAWULAN KUSUMAWARDANI
B200130350

Telah diperiksa dan dipersetujui untuk diuji oleh

Dosen Pembimbing



(Fatchan Achyani, S.E., M.Si., Dr.)




HALAMAN PENGESAHAN
PENGARUH PAD, DAU, DAK, SILPA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA JAWA
TENGAH TAHUN 2010-2015

Ditulis Oleh:

ISMAWULAN KUSUMAWARDANI
B200130350

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Rabu, 14 juni 2017

Dewan penguji :

Ketua Penguji : Fatchan Achyani S.E.,M.Si.,Dr. (.....) 
Anggota Penguji I : Dr.Noer Sasongko,SE.,M.Si,Ak. CA (.....) 
Anggota Penguji II : Drs.Agus Endro S, M.Si (.....) 

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Syamsudin, MM)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 05 April 2018

Penulis



ISMAWULAN KUSUMAWARDANI

B 200130350

**PENGARUH PAD, DAU, DAK, SiLPA DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI TERHADAP BELANJA MODAL
DI KABUPATEN/KOTA JAWA TENGAH TAHUN 2010-2015**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh PAD, DAU, DAK, SiLPA, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2010-2015.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs www.bps.go.id. Populasi dari penelitian ini adalah Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 14 Kabupaten/Kota. Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian.

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa : variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal, hal ini ditunjukkan oleh signifikan sebesar $0,000 < \alpha$, sehingga H1 diterima dengan taraf signifikansi ($0,000 < 0,05$). Pada variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikan sebesar $0,004 < \alpha$, sehingga H2 diterima dengan taraf signifikansi ($0,004 < 0,05$). Sedangkan variabel DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikan sebesar $0,109 > \alpha$, sehingga H3 ditolak dengan taraf signifikansi ($0,109 > 0,05$). Variabel SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikan sebesar $0,001 < \alpha$, sehingga H4 diterima dengan taraf signifikansi ($0,001 < 0,05$). Sedangkan variabel Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikan sebesar $0,214 > \alpha$, sehingga H5 ditolak dengan taraf signifikansi ($0,214 > 0,05$).

Kata Kunci : PAD, DAU, DAK, SiLPA, dan Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of PAD, DAU, DAK, SiLPA, and Economic Growth toward financial Capital Expenditure at regency or city of Central Java in 2010-2015.

The research uses descriptive quantitative method by using secondary data which is received from website www.bps.go.id. The population of the research is Regency / City of Central Java. The sample number of the research is 14 regencies / cities of Central Java. The collecting sample technique is purposive sampling. Data analysis method uses multiple linear regression to examine and prove the research hypothesis.

Based on data analysis can be concluded that: PAD variable gives significant influence towards financial capital expenditure, it is showed by significant influence in amount of $0.000 < \alpha$, so H1 is received with significance degree ($0,000 < 0,05$). On DAU variable gives significant influence towards financial capital expenditure, it is showed by significant influence in the amount of $0,004 < \alpha$, so H2 is received with significance degree ($0,004 < 0,05$). PAD variabel gives significant influence toward financial capital expenditure. Whereas DAK variable does not give significant influence toward financial capital expenditure, it is showed by significant influence in the amount of $0,109 > \alpha$, so H3 is rejected with significance degree ($0,109 > 0,05$) it is showed by significant influence in the amount of $0,001 < 0,05$). So H4 is received with significant degree ($0,000 < 0,05$). SiLPA variable gives significant influence toward financial capital expenditure, it is showed by significant influence in the amount of $0,001 < \alpha$, so H4 is received with significance degree ($0,001 < 0,05$). Whereas economic growth variable does not give significant influence towards financial capital expenditure, it is showed by significant influence in the amount of $0,214 > \alpha$, so H5 is rejected with the significance degree ($0,214 > 0,05$).

Keywords: PAD, DAU, DAK, SiLPA, and Economy Growth

1. PENDAHULUAN

Masa sentralisasi pemerintahan telah berakhir diganti dengan otonomi daerah. Berdasarkan UU No.32 tahun 2004, setiap daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin adanya campur tangan dari pemerintah pusat. UU No. 32 tahun 2004 menjelaskan pula bahwa pemberian otonomi luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan kata lain, tujuan otonomi daerah adalah untuk menciptakan kemandirian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah (Arwati dan Hadiati, 2013).

Salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah adalah dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yaitu dengan memberikan proporsi alokasi belanja modal yang lebih tinggi pada sektor-sektor yang dianggap produktif (Nugroho, 2012 dalam Sugiardi dan Supadmi, 2014).

Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap. Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian (Jaya dan Dwirandra 2014). Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik (Nuarisa, 2013).

Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah dengan adanya peningkatan Pertumbuhan Ekonomi ternyata tidak diikuti dengan peningkatan Belanja Modal hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah Belanja Modal dibandingkan dengan jumlah Belanja Pegawai. Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak kepada Pertumbuhan Ekonomi. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat akan dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan mendorong atau menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Bertambahnya Pendapatan Asli Daerah akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan Belanja Modal (Purwanto, 2013).

PAD merupakan sumber pembiayaan bagi Pemerintah daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD-nya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya (Ardhani, 2011 dalam Wandira, 2013).

Perbedaan kemampuan keuangan yang dimiliki setiap daerah dalam hal pendanaan kegiatan pemerintahannya dapat memicu terjadinya ketimpangan

fiskal antar daerah. Sebagai upaya menghadapi ketimpangan fiskal tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan pengalokasian dana yang diperoleh dari APBN untuk pendanaan kebutuhan rumah tangga daerahnya untuk pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum adalah salah satu sumber pendapatan dari pemerintah pusat yang dialokasikan sebagai bentuk pemerataan serta keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Putro, 2011 dalam Sugiardi dan Supadmi, 2014).

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Salah satu peran DAU adalah untuk pemerataan horizontal yaitu dengan menutup celah fiskal yang berada diantara kebutuhan fiskal dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah (Mentayani dan Rusmanto, (2013)). Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin, 2010 dalam Wandira, 2013).

Salah satu dana perimbangan adalah DAK, yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani, 2011 dalam Wandira, 2013).

Dalam upaya membiayai kegiatan-kegiatan daerah, pemda memanfaatkan PAD, transfer dari pusat berupa DAU dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Jumlah SiLPA yang ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pemda kota/kabupaten. Pelampauan target SiLPA yang bersumber dari pelampauan target pemda dan efisiensi sangat diharapkan, sedangkan yang bersumber dari ditiadakannya program/kegiatan pembangunan apalagi dalam jumlah yang tidak wajar sangat merugikan masyarakat (Mentayani dan Rusmanto, 2013). Selain dari PAD dan transfer dari pusat untuk membiayai kegiatannya, Pemda juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Dalam acara penyerahan DIPA 2012 di Istana Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia yang belum memuaskan dan menghendaki agar sisa anggaran tidak digunakan untuk keperluan yang tidak jelas namun dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Prasetyantoko dalam harian *Seputar Indonesia* (21/12/11) yakin bahwa anggaran negara yang menganggur bisa dialokasikan untuk belanja yang memberikan nilai tambah dan mampu menstimulasi laju pertumbuhan ekonomi nasional (Kusnandar dan Siswantoro, 2011).

Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian (Hasan, 2012 dalam Sugiardi dan Supadmi, 2014). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dari kegiatan perekonomian dimana hal tersebut berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat (Putro, 2010 dalam Jaya dan Dwirandra, 2014).

Terdapat sejumlah penelitian yang mengungkapkan pengaruh PAD, DAU, DAK, dan, SiLPA pada belanja modal, yaitu penelitian oleh Nuarisa (2012) menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus mengungkapkan bahwa PAD, DAU, DAK berpengaruh terhadap belanja modal. Mawarni, dkk (2013) menyebutkan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal, DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Arwati dan Hadiati (2013) menyimpulkan bahwa PAD, DAU, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Mentayani dan Rusmanto (2013) menyimpulkan bahwa secara parsial PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Modal. Simanjuntak, dkk (2013) juga mengungkapkan bahwa DAU, dan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang mengungkapkan Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU terhadap pengalokasian anggaran belanja modal ,yaitu Arwati dan Hadiati (2013) menyimpulkan bahwa secara parsial PAD yang berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Jaya dan Dwiranda (2014) menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh pada belanja modal, serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada belanja modal.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Arwati dan Hadiati (2013) yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah variabel yang berbeda yaitu DAK (Dana Alokasi Khusus) dan SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Sampel yang digunakan adalah Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis dapat mengambil

judul “PENGARUH PAD,DAU,DAK, SiLPA,DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA JAWA TENGAH TAHUN 2010-2015”.

1.1 Kajian Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling 1976 dalam Yovita 2011). Terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga mungkin saja pihak agen tidakselalu melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan prinsipal. (Bangun 2009 dalam Yovita 2011) menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan cabang dari *game theory* yang mempelajari suatu model kontraktual yang mendorong agen untuk bertindak bagi prinsipal saat kepentingan agen bias saja bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Prinsipal pendelegasikan pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan kepada agen, dimana wewenang dan tanggung jawab agen maupun principal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Kenyataannya, wewenang yang diberikan prinsipal kepada agen sering mendatangkan masalah karena tujuan prinsipal berbenturan dengan tujuan pribadi agen. Kewenangan yang dimiliki, manajemen bisa bertindak dengan hanya menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan kepentingan prinsipal. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh keduanya, sehingga menimbulkan adanya asimetri informasi (*asymmetric information*).

Di organisasi publik, khususnya di pemerintahan daerah secara sadar atau tidak, teori keagenan ini telah dipraktikkan, termasuk pemerintahan daerah di Indonesia. Apalagi sejak otonomi dan desentralisasi diberikan kepada pemerintah daerah sejak tahun 1999.

Akhir-akhir ini, pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten sibuk dengan salah satu kegiatan utamanya yaitu menyusun anggaran APBD 2008.

Dalam proses penyusunan dan perubahan anggaran daerah, ada dua perspektif yang dapat ditelaah dalam aplikasi teori keagenan, yaitu hubungan antara eksekutif dengan legislatif, dan legislatif dengan pemilih (*voter*) atau rakyat. Implikasi penerapan teori keagenan dapat menimbulkan hal positif dalam bentuk efisiensi, tetapi lebih banyak yang menimbulkan hal negatif dalam bentuk perilaku oportunistik (*opportunistic behaviour*). **Ini terjadi** karena pihak agensi memiliki informasi keuangan daripada pihak prinsipal (keunggulan informasi), sedangkan dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri (*self-interest*) karena memiliki keunggulan kekuasaan (*discretionary power*).

Masalah keagenan yang timbul di kalangan eksekutif adalah cenderung memaksimalkan utiliti (*self-interest*) dalam pembuatan atau penyusunan anggaran APBD, karena memiliki keunggulan informasi (asimetri informasi). Akibatnya eksekutif cenderung melakukan "budgetary slack". Hal ini terjadi dikarenakan pihak eksekutif akan mengamankan posisinya dalam pemerintahan di mata legislatif dan masyarakat/rakyat, bahkan boleh jadi untuk kepentingan pilkada berikutnya. Namun demikian *budgetary slack* APBD lebih banyak untuk kepentingan pribadi kalangan eksekutif (*self interest*) ketimbang untuk kepentingan masyarakat.

Masalah keagenan yang timbul di kalangan legislatif (anggota dewan) terjadi dari dua tinjauan perspektif, sebagai prinsipal atas eksekutif dan sebagai agen dengan rakyat (pemilih). Masalah keagenan yang timbul dalam perspektif prinsipal akan cenderung melakukan "kontrak semu" dengan pihak eksekutif karena memiliki *discretionary power*. Dalam proses penyusunan anggaran, pihak legislatif cenderung melakukan "titipan" proyek/kegiatan, hal ini terjadi untuk kepentingan pribadi secara jangka panjang demi menjaga kesinambungan dan mengharumkan nama politisi/anggota dewan.

Masalah keagenan anggota legislatif sebagai agen, dimana posisi legislatif sebagai pihak agen dan rakyat/pemilih sebagai pihak prinsipal. Pihak legislatif sebagai agen akan membela kepentingan rakyat atau pemilihnya, namun seringkali ini tidak terjadi, karena pendelegasian kewenangan rakyat/pemilih terhadap legislatornya tidak memiliki kejelasan aturan konsekuensi kontrol keputusan yang disebut "abdication". Akibatnya, legislator cenderung menyusun anggaran untuk kepentingan pribadi atau golongannya dan kondisi ini disebut oleh Garamfalvi (1997) sebagai *political corruption* dalam proses penyusunan anggaran, dan sekiranya anggaran tersebut dilaksanakan akan menimbulkan *administration corruption*. Kalau kondisi di atas terjadi, maka proses penyusunan/perubahan anggaran APBD yang semestinya akan menghasilkan outcome yang efisien dan efektif dari alokasi sumber daya dalam anggaran akan terdistorsi karena adanya perilaku oportunistik untuk kepentingan pribadi dan politisi.

1.2 Pengembangan Hipotesis

1.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli daerah terhadap Belanja Modal (X1)

Menurut Ardhani(2011) dalam Wandira(2013), PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD-nya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastrukturatau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya. Darwanto danYulia(2007) dalam Wandira (2013) menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal.Temuan inidapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Hal ini

sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya. Dalam penelitian Nuarisa (2012); Wandira (2012); Mawarni, Darwanis, dan Abdullah (2013); Arwati dan Hadiati (2013); Mentayani dan Rusmanto (2013); Aprizay, dkk (2014); Jaya dan Dwiranda (2014); Sugiardi dan Supadmi (2014) menunjukkan bukti bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal.

H1 = PAD berpengaruh terhadap belanja modal

1.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal (X2)

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hal ini berkaitan dengan hubungan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah serta merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pusat kepada daerah. Transfer dari pusat ini cukup signifikan sehingga pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk memberi pelayanan publik yang lebih baik atau untuk keperluan lain kepada publik.

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara signifikan terhadap Variabel Belanja Modal. Hal ini disebabkan dengan adanya transfer DAU dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal (Purwanto, 2013).

Dalam Penelitian Nuarisa (2012); Wandira (2012), Mawarni, Darwanis, dan Abdullah (2013); Mentayani dan Rusmanto (2013); Arwati dan Hadiati (2013); Aprizay, dkk (2014); Sugiardi dan Supadmi (2014) menunjukkan bukti empiris bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.

H2 = DAU berpengaruh terhadap belanja modal

1.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (X3)

Dana perimbangan adalah perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Salah satu dana perimbangan adalah DAK, yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani, 2011 dalam Wandira, 2012). Dalam penelitian Nuarisa (2012); Wandira (2012); Aprizay, dkk (2014) menunjukkan bukti bahwa DAK berpengaruh terhadap belanja modal.

H3 = DAK berpengaruh terhadap belanja modal

1.2.4 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap belanja modal (X4)

SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. (Aprizay, dkk 2014).

Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006, “Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Selanjutnya pada Pasal 137 sampai dengan Pasal 153, SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dengan sebijak mungkin untuk meningkatkan pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang akan meningkatkan produktivitas publik. SiLPA juga merupakan suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SiLPA merupakan indikator efisiensi karena SiLPA akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi. Pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan. Sehingga SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal.

Sumber pendanaan lainnya untuk alokasi belanja modal penyediaan berbagai fasilitas publik adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mentayani dan Rusmanto (2013); Aprizay, dkk (2014); Sugiardi dan Supadmi (2014) menunjukkan bukti bahwa SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal.

H4 = SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal

1.2.5 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal (X5)

Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan dasar untuk

pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan memprioritaskan: perbaikan infrastruktur; peningkatan pendidikan; pelayanan kesehatan; membangun fasilitas yang dapat mendorong investasi baik asing maupun lokal; menyediakan perumahan dengan biaya rendah; melakukan restorasi lingkungan serta penguatan di sektor pertanian. Biaya yang digunakan semua fasilitas tersebut berasal dari belanja modal, semua fasilitas, sarana, dan prasarana yang ada akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi sudah tinggi, dan fasilitas sudah terpenuhi maka tidak lagi diperlukan pembiayaan yang tinggi untuk fasilitas tersebut. Sehingga semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin rendah belanja modal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arwati dan Hadiati (2013) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal. Namun berbeda dengan Mawarni, dkk (2013) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

H5 = Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal

2. METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan melihat Laporan Realisasi APBD dan Tabel Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode 2010–2015. Data penelitian ini diperoleh dari Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS). Populasi penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis data menggunakan Regresi Linier Berganda.

2.1 Pengukuran Variabel

Variabel dependent dalam penelitian ini adalah belanja modal. Variabel independent dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, sisa lebih pembiayaan anggaran dan pertumbuhan ekonomi.

2.2 Definisi operasional variabel

2.2.1 Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya}$$

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah
HPD = Hasil Pajak Daerah
RD = Retribusi Daerah
PLPD = Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah
LPS = Lain-lain Pendapatan yang Sah

2.2.3 Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Keterangan:

Celah fiskal = kebutuhan fiskal - kapasitas fiskal

- 2.2.4 Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK untuk masing-masing pemerintah provinsi dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2010-2016 (Ardhani, 2011 dalam Purwanto, 2013).
- 2.2.5 Sisa lebih pembiayaan anggaran Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{SiLPA} = \text{Surplus/Defisit Realisasi Anggaran} + \text{Pembiayaan Neto}$$

- 2.2.6 Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(\text{PDRBt} - \text{PDRBt-1})}{(\text{PDRBt-1})} \times 100\%$$

Keterangan :

PDRBt = Produk Domestik Bruto Tahun Sekarang

PDRBt-1 = Produk Domestik Regional Bruto Tahun Sebelumnya

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil uji normalitas

| Variabel | Kolmogorov Smirnov | Probabilitas | Keterangan |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|------------|
| <i>Unstandardized residual</i> | 0.848 | 0,468 | Normal |

Sumber: Data sekunder diolah, 2017.

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov* adalah 0,848 dengan probabilitas 0,468 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat

diambil kesimpulan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas

| Variabel | Tolerance | VIF | Keterangan |
|-----------------|------------------|------------|-------------------------|
| PAD | 0,424 | 2,359 | Bebas Multikolinieritas |
| DAU | 0,258 | 3,883 | Bebas Multikolinieritas |
| DAK | 0,373 | 2,679 | Bebas Multikolinieritas |
| SiLPA | 0,575 | 1,740 | Bebas Multikolinieritas |
| PDRB | 0,537 | 1,861 | Bebas Multikolinieritas |

Sumber: Data sekunder diolah, 2017.

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang memiliki *Tolerance* lebih dari 0,1 dan semua variabel bebas memiliki nilai *VIF* kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independen sehingga model regresi ini tidak ada masalah multikolinieritas.

Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi

| Variabel | -2 | DW | +2 | Kesimpulan |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| PAD, DAU, DAK, SiLPA, PDRB | -2 | 1,838 | +2 | Bebas autokorelasi |

Sumber: Data sekunder diolah, 2017.

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa hasil perhitungan uji autokorelasi memperoleh nilai DW sebesar 1,838, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai -2 dan +2, nilai DW terletak di antara ($-2 < DW < +2$) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak ada masalah autokorelasi.

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Variabel | p-value | Keterangan |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| PAD | 0,780 | Tidak terjadi Heteroskedastisitas |
| DAU | 0,830 | Tidak terjadi Heteroskedastisitas |
| DAK | 0,514 | Tidak terjadi Heteroskedastisitas |
| SiLPA | 0,624 | Tidak terjadi Heteroskedastisitas |
| PDRB | 0,667 | Tidak terjadi Heteroskedastisitas |

Sumber: Data sekunder diolah, 2017.

Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai *p-value* masing-masing variabel independen berada di atas 0,05, sehingga model penelitian bebas heteroskedastisitas.

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Berganda

| Variabel | Koefisien Regresi | t_{hitung} | p-value |
|-----------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| Konstanta | -34830,898 | -1,200 | 0,234 |
| PAD | 0,592 | 3,049 | 0,003 |
| DAU | 0,224 | 2,994 | 0,004 |
| DAK | 0,969 | 1,623 | 0,109 |
| SiLPA | -0,457 | -3,418 | 0,001 |
| PDRB | -1827,504 | -1,253 | 0,214 |

Sumber: Data sekunder diolah, 2017.

Berdasarkan hasil analisis, maka model persamaan regresi berganda yang dapat disusun sebagai berikut:

$$BM = -34830,898 + 0,592 \text{ PAD} + 0,224 \text{ DAU} + 0,969 \text{ DAK} + -0,457 \text{ SiLPA} + -1827,504 \text{ PE} + e$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya nilai konstanta dengan parameter negatif sebesar -34830,898. Hal ini berarti bahwa apabila nilai pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, sisa lebih pembiayaan anggaran, pertumbuhan ekonomi konstan atau sama dengan nol, maka belanja modal daerah mengalami penurunan.
- Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah dengan parameter positif sebesar 0,592. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah maka belanja modal daerah juga meningkat.
- Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel dana alokasi umum dengan parameter positif sebesar 0,224. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi nilai dana alokasi umum maka belanja modal daerah juga meningkat.
- Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel dana alokasi khusus dengan parameter positif sebesar 0,969. Hasil ini dapat

dijelaskan bahwa semakin tinggi nilai dana alokasi khusus maka belanja modal daerah mengalami penurunan.

- Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel sisa lebih pembiayaan anggaran dengan parameter negatif sebesar -0,457. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi nilai sisa lebih pembiayaan anggaran maka belanja modal akan menurun.
- Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomidengan parameter negatif sebesar -1827,504. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka nilai belanja modal akan menurun.

3.1 Hasil Pengujian Hipotesis

3.1.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal.

Hasil pengujian menunjukkan nilai $t_{hitung} 3,049 > 2,571$ dengan $p\ value$ $0,003 < 0,05$, sehingga pendapatan daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Peningkatan PAD mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD-nya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya. Sehingga pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mawarni et al (2013) dan Arwati dan Hadiati (2013), yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2012) serta penelitian Mentayani dan Rusmanto (2013).

3.1.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Hasil pengujian menunjukkan nilai $t_{hitung} 2,994 > 2,571$ dengan $p\ value\ 0,004 < 0,05$, sehingga Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana hibah (grants) yang kewenangan pengguna diserahkan penuh kepada Pemda penerima. Dana yang didapat pemerintah daerah dari DAU akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah, melengkapi serta memperbaiki sarana dan prasarana daerah. Sehingga besar kecilnya DAU mempengaruhi seberapa banyak perbaikan serta pengembangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian ini sejalan dengan Arwati dan Hadiati (2013) serta penelitian Sugiardi dan Supadmi (2014) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mawarni et al (2013) dan Wandira (2012).

3.1.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

Hasil pengujian menunjukkan nilai $t_{hitung} 1,623 < 2,571$ dengan $p\ value\ 0,109 > 0,05$, sehingga Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK diperuntukkan untuk program-program nasional di daerah, baik program pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan lingkungan. DAK yang diperoleh tersebut ditujukan untuk program nasional yang tidak ada hubungannya dengan belanja modal. Sehingga DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian ini

sejalan dengan penelitian yang dilakukan Irawan dan Drs. Agus Endro Suwarno, M.Si (2016). Namun Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2012) dan Nuarisa (2012) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap belanja modal.

3.1.4 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal.

Hasil pengujian menunjukkan nilai $t_{hitung} -3,418 > 2,571$ dengan $p\ value$ $0,001 < 0,05$, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal. Menurut Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006, “Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Selanjutnya pada Pasal 137 sampai dengan Pasal 153, SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dengan sebijak mungkin untuk meningkatkan pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang akan meningkatkan produktivitas publik. SiLPA juga merupakan suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SiLPA merupakan indikator efisiensi karena SiLPA akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi. Pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan. Sehingga SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mentayani dan Rusmanto (2013) serta Aprizay (2014).

3.1.5 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal.

Hasil pengujian menunjukkan nilai $t_{hitung} -1,253 < 2,571$ dengan $p\ value$ $0,214 < 0,05$, sehingga Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan dasar untuk pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan memprioritaskan: perbaikan infrastruktur; peningkatan pendidikan; pelayanan kesehatan; membangun fasilitas yang dapat mendorong investasi baik asing maupun lokal; menyediakan perumahan dengan biaya rendah; melakukan restorasi lingkungan serta penguatan di sektor pertanian. Biaya yang digunakan semua fasilitas tersebut berasal dari belanja modal, semua fasilitas, sarana, dan prasarana yang ada akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi sudah tinggi, dan fasilitas sudah terpenuhi maka tidak lagi diperlukan pembiayaan yang tinggi untuk fasilitas tersebut. Sehingga semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin rendah belanja modal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Jaya dan Dwiranda (2014). Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Arwati dan Hadiati (2013), yang menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal.

4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui bahwa penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil pengujian menunjukkan nilai $t_{hitung} 3,049 > 2,571$ dengan $p\ value\ 0,003 < 0,05$, sehingga **H1 Diterima**.
- b. DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil pengujian menunjukkan nilai $t_{hitung} 2,994 > 2,571$ dengan $p\ value\ 0,004 < 0,05$, sehingga **H2 Diterima**.

- c. DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil pengujian menunjukkan nilai $t_{hitung} 1,623 < 2,571$ dengan $p\ value\ 0,109 > 0,05$, sehingga **H3 Ditolak**.
- d. SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil pengujian menunjukkan nilai $t_{hitung} -3,418 > 2,571$ dengan $p\ value\ 0,001 < 0,05$, sehingga **H4 Diterima**.
- e. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil pengujian menunjukkan nilai $t_{hitung} -1,253 < 2,571$ dengan $p\ value\ 0,214 < 0,05$, sehingga **H5 Ditolak**.

4.2 Keterbatasan Penelitian

- a. Peneliti hanya mengambil sampel kabupaten/kota yang terdapat di Jawa Tengah, sehingga belum membuktikan pengaruh variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, sisa lebih pembiayaan anggaran, pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal pada daerah lain.
- b. Peneliti menggunakan variabel yang sudah digunakan oleh peneliti terdahulu, sehingga belum bisa membuktikan ada variabel lain yang memiliki pengaruh lebih terhadap belanja modal selain variabel yang telah dijelaskan.

4.3 Saran

Dengan melihat hasil yang diperoleh, maka ditemukan beberapa saran yang mungkin berguna, diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk penelitian berikutnya diharapkan menggunakan sampel penelitian yang lebih banyak, sehingga hasilnya akan lebih tergeneralisasi.
- b. Untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama diharapkan menambah variabel lain yang mempengaruhi belanja modal, sehingga hasil penelitian bisa memiliki kontribusi yang berbeda dengan penelitian terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Arwati dan Hadiati. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran

Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. Semantik 2013, ISBN: 979-26-0266-6.

Aprizay, dkk. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi, Vol.3, No.1.*

Jaya dan Dwirandra.2014.Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *EjurnalAkuntansi Universitas Udayana 7.1 :79-92.*

Mawarni, dkk.2013.Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh).*Jurnal Akuntansi, Vol.2, No.2.*

Mentayani dan Rusmanto (2013). 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan. *Jurnal InFestasi, Vol.9, No.2.*

Nuarisa, Sheila Ardhian. 2012. Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Universitas Negeri Semarang, Indonesia.*Accounting Analysis Journal 1 (3) (2013).*

Purwanto, Fiona Puspita Devi. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011).Universitas Negeri Yogyakarta.Skripsi.

Sugiardi dan Supadmi. 2014. Pengaruh PAD, DAU, dan SiLPA Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. *EjurnalAkuntansi Universitas Udayana 7.2 :477-495.*

Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD), DanaAlokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Universitas Negeri Semarang, Indonesia.Skripsi.*

Simanjutak, dkk. 2013.Analysis of Flypaper Effect in General Allocation fund and Regional Original Income to Regional Expenditure of Districts and Cities in South Sumatera. *The 14th FourA Annual Conference 2013, Penang, Malaysia, October 28-30, 2013.*

- Yovita, Farah Marta. 2011. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010)". *Diponegoro Jurnal Of Accounting*. Semarang: *UNDIP*.
- Irawan, Bobby Andi dan , Drs. Agus Endro Suwarno, M.Si .2016. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Provinsi Di Indonesia". *Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Danieswara, Yoga Diaz Rischi dan Dr. Fatchan Achyani, SE., M.Si.2017."Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2013-2015)". *Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.